

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada umumnya perkembangan negara, kota-kota memiliki peran yang penting sebagai kutub pertumbuhan ekonomi (*growth centers*). Kota-kota tidak saja berperan sebagai pasar besar untuk produk perdesaan, tetapi juga berperan sebagai penyedia jasa dan lapangan kerja. Akibatnya, banyak kota akan menghadapi masalah serius dalam degradasi lingkungan hidup dan keterbatasan infrastrukturnya.

Hubungan Internasional pun mengalami sebuah perkembangan yang sangat luas, sejak berakhirnya perang dunia kedua tatanan kehidupan pun mengalami perubahan dunia. Jika kita melihat dalam analisa suatu negara , tidak hanya pemerintah pusat saja yang berwenang melakukan kerjasama internasional. Hal ini bertujuan untuk mencapai suatu tujuan nasional serta kebutuhan masyarakat daerah ataupun per-wilayah yang memang secara pribadi tidak dapat dipenuhi secara mandiri oleh daerah tersebut. Maka dari itu terjadi penyerahan wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melakukan kerjasama internasional.

Dalam pelaksanaannya pemerintah daerah harus tetap melaporkan inisiasi bentuk kerjasama internasional yang akan dilakukan kepala pemerintah pusat agar berkordinasi antar lembaga dalam pemerintahan di suatu negara tetap sejalan.

Mengingat besarnya tantangan di masa mendatang yang lebih berat ini, kerjasama antar kota akan sangat bermanfaat untuk dilaksanakan. Kerjasama antar kota yang dimaksudkan adalah segala bentuk kerjasama di antara kota-kota berlainan di dunia, yang kemudian berkembang lingkungnya tidak hanya dalam lingkup kota saja tetapi juga kerjasama di antara propinsi atau bahkan negara bagian di dua negara yang berlainan.

Hubungan pemerintah daerah dengan yang satu dengan yang lainnya itu berkembang kepada sebuah kerjasama yang belum lama ini disebut *sister city*, yang merupakan salah satu bentuk interaksi internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan daerah di negara luar yang bertujuan untuk pemerintah daerah dan masyarakat daerah ikut serta dalam melaksanakan pembangunan daerah.

Konsep kerjasama yang dikenal dengan *Sister Cities* dan atau *Twinning Cities* ini semula merupakan konsep hubungan kemitraan yang dikembangkan di Amerika Serikat pada tahun 1960-an sejalan dengan ide Presiden Eisenhower untuk meningkatkan diplomasi di antara masyarakat atau *people to people diplomacy* yang dicetuskan pada tahun 1956. Tujuan utama kerjasama antar kota waktu itu adalah menjembatani hubungan antara masyarakat kota di suatu negara dengan masyarakat kota di negara lain melalui apa yang disebut dengan *people diplomacy*. ("Bagian kerjasama kota bandung," 2017)

Kerjasama antar kota di suatu negara dengan kota di negara lain ini diperlukan sebagai konsekuensi dari interdependensi di antara kota-kota di dunia dalam menangani permasalahan perkotaan yang kompleks. Selain itu kerjasama antar kota di suatu negara dengan kota di negara lain juga diperlukan

seiring dengan proses globalisasi dan liberalisasi ekonomi yang sedang berlangsung dewasa ini yang telah mendorong peningkatan intensitas komunikasi dan interaksi antar bangsa, termasuk antar kota-kota dan masyarakatnya.(Viotti and Mark V.Kauppi, 1999)

Kerjasama *Sister City* merupakan persetujuan kerjasama antara dua kota, daerah setingkat provinsi, negara bagian atau prefektur yang memiliki satu atau lebih kemiripan karakteristik dimana dua daerah tersebut terdapat pada dua negara yang berbeda. Kemiripan tersebut misalnya ada pada kemiripan budaya, latar belakang sejarah atau jika dilihat dari segi geografis kedua daerah sama-sama daerah pantai atau daerah kepulauan. Kerjasama *Sister City* bermanfaat dan saling menguntungkan. Kerjasama *Sister City* ini terbentuk karena sejumlah alasan, seperti: persamaan kedudukan dan status administrasi, persamaan ukuran luas wilayah dan fungsi.

Pada masa seperti sekarang ini, kerja sama antar kota atau propinsi sudah semakin meningkat dalam kuantitasnya, namun masih perlu pengisian dan pengembangan agar kerja sama tersebut dapat lebih efektif pelaksanaannya, baik dalam meningkatkan hubungan persahabatan antar kedua negara dan pemerintahan daerahnya maupun antar unit-unit yang lebih kecil serta antara kalangan masyarakat dan pengusaha. Melalui kerjasama tersebut, minimal setiap kota yang terlibat akan dapat saling bertukar pikiran dan pengalaman, serta saling memberi bantuan dan berupaya bersama untuk memajukan kotanya. Nampaknya konsep kerjasama antar kota ini, menarik perhatian pihak pemerintah Indonesia untuk melakukan hal yang serupa dengan apa yang telah dilakukan oleh beberapa negara tersebut di atas.

Dengan adanya kebijakan pemerintah pusat untuk memberikan wewenang dan otonomi lebih besar kepada daerah untuk menentukan atau menyusun sendiri program pembangunan yang akan dilaksanakan di daerah akan lebih memerlukan Sumber Daya dan membuka peluang yang lebih besar bagi munculnya kerjasama antar kota dan antar propinsi di Indonesia dengan kota-kota di luar negeri terutama kota-kota di negara-negara maju.

Hal ini dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif jalan keluar yang positif bagi kota-kota Indonesia untuk bergerak selangkah lebih maju, jika kita melihat kemampuan kota-kota dan propinsi-propinsi di Indonesia yang dirasakan belum tumbuh sebagaimana yang diharapkan. Jika hal tersebut tidak mendapatkan suatu perhatian yang serius, dikhawatirkan ketimpangan akan semakin melebar dan pada akhirnya akan mengganggu konsentrasi pembangunan secara nasional, terutama dalam menghadapi perkembangan internasional yang semakin terbuka.

Di Indonesia, sudah cukup banyak kota yg telah menjalin kerjasama antarkota dengan kota-kota di luar negeri. Misalnya saja kota Jakarta memiliki sebelas *sister cities*, yaitu Los Angeles, Rotterdam, Berlin, Paris, Athena, Tokyo, Seoul, Beijing, Bangkok, Casablanca, dan Jeddah. Kemudian kota Bandung yang memiliki *sister city* dengan kota Braunschweig di Jerman ataupun kota Surabaya yang menjalin *sister city* dengan kota Osaka maupun dengan kota Kochi di Jepang. (Kompas, 1997)

Munculnya peluang dan tantangan dengan melihat poin-poin yang telah disepakati oleh kedua belah pihak didalam perjanjian kerjasama, menjadi bahan dan dasar bagi kedua pemerintah kota untuk membuat dan mengatur strategi kebijakan yang akan diterapkan masing-masing, khususnya pemerintah Kota Bandung dalam menjalankan kerjasama *Sister City* tersebut.

Disamping itu penulis mengaitkan *Multytrack Diplomacy* dalam frase kerjasama *Sister City* Kota Bandung dengan Kota Braunschweig sebagai pokok bahasan dalam penulisan skripsi ini. Atas alasan tersebut penulis mengangkat judul: **“Kerjasama *Sister City* Bandung-Braunschweig Dalam Meningkatkan UMKM Kota Bandung”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, dalam penelitian ini terdapat beberapa masalah yang menjadi pokok pembahasan dalam penulisan. Adapun permasalahan tersebut dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Kerjasama *Sister City* Kota Bandung-Braunschweig ?
2. Bagaimana Perkembangan UMKM Kota Bandung Setelah Adanya Kerjasama *Sister City* Bandung-Braunschweig?
3. Bagaimana Kontribusi Kerjasama *Sister City* Kota Bandung-Braunschweig dalam meningkatkan UMKM Kota Bandung ?

1.2.1 Pembatasan Masalah

Mengingat bahwa luasnya ruang lingkup kerjasama *Sister City* Bandung-Braunschweig dan demi memudahkan Penulis dalam penulisan Skripsi ini maka penulis membatasi pembahasan yang akan diteliti dalam Skripsi ini di mana penulis fokus pada program kerjasama *Sister City* Kota Bandung dengan Kota Braunschweig dalam meningkatkan perekonomian Kota Bandung tahun 2008-2012.

1.2.2 Perumusan Masalah

Perumusan masalah dilakukan dengan menarik masalah dari identifikasi masalah dalam bentuk pertanyaan yang bersumber dari permasalahan yang telah terpilih dan merupakan suatu Research Problem, maka penulis membuat sebuah rumusan masalah, yaitu: : **“Bagaimana Kontribusi Kerjasama *Sister City* Bandung-Braunschweig Dalam Meningkatkan UMKM Kota Bandung ?”**

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui bagaimana Kerjasama *Sister City* Kota Bandung-Braunschweig
2. Untuk mengetahui bagaimana kondisi perekonomian Kota Bandung dengan adanya Kerjasama *Sister City* Kota Bandung-Braunschweig.
3. Untuk mengetahui bagaimana kontribusi Kerjasama *Sister City* Kota Bandung-Braunschweig.

1.3.2 Kegunaan Peneliti bertujuan untuk :

1. Untuk pembuatan penelitian yang diajukan untuk menempuh ujian sidang sarjana Strata 1 (S-1) pada Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan Bandung.
2. Untuk menambah wawasan pengetahuan penulis baik secara teoritis maupun praktis dalam menganalisa fenomena yang ada dengan teori-teori ilmu pengetahuan yang di dapat di bangku kuliah.
3. Untuk mengetahui dampak meningkatnya dari diadakannya kerja sama *Sister City* (Bandung-Braunschweig) dalam meningkatkan ekonomi Kota Bandung.